

MODEL PENGABDIAN BERBASIS INKLUSIFITAS DAN BERKELANJUTAN: TRANSFORMASI UMKM PEREMPUAN DESA DUKUHDEMPOK MELALUI PROGRAM PROMAHADESA

Mohammad Taufiqur Rahman¹, Selvi Putri Dwi Ismania², Chintya Dwi Lestari³,
Wahyu Deva Romadhon⁴, Andjani Prasetya Dewi⁵, Yunita Rizqi Hidayah⁶,
Muhammad Idham Arwani⁷, Ayu Amilia⁸

Universitas Jember

Email: promwirasanadaryasrikandi@gmail.com

Abstrak: Program Pengabdian Masyarakat Desa (PROMAHADESA) merupakan inisiatif pemberdayaan kelompok perempuan purna pekerja migran di Desa Dukuh Dempok, Kabupaten Jember, yang berfokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Program ini dilakukan melalui kolaborasi strategis dengan DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) sebagai mitra utama, serta Halal Center sebagai mitra teknis, dengan tujuan utama membantu pelaku usaha UMKM dalam memperoleh legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi halal. Kegiatan ini mencakup tahap-tahap krusial, termasuk identifikasi data pelaku UMKM, sosialisasi pentingnya legalitas usaha, pelatihan digital marketing, dan pendampingan intensif dalam proses pengurusan izin usaha. Puncak kegiatan ditandai dengan penyerahan sertifikat legalitas usaha kepada 25 pelaku UMKM, yang kini memiliki landasan hukum untuk pengembangan usaha mereka. Hasil program menunjukkan peningkatan kesadaran dan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola usaha secara profesional, memperluas akses pasar, dan meningkatkan daya saing di era digital. Program ini tidak hanya berkontribusi pada transformasi ekonomi melalui legalitas usaha, tetapi juga memperkuat peran perempuan dalam pembangunan inklusif berkelanjutan. Dengan pendekatan berbasis kebutuhan lokal dan dukungan para mitra strategis, PROMAHADESA menjadi model pengabdian yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan, memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kata kunci: Dukuh Dempok, Inklusif, UMKM

Abstract: The Village Community Service Program (PROMAHADESA) is an initiative to empower groups of former migrant workers in Dukuh Dempok Village, Jember Regency, focusing on the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) based on inclusivity and sustainability. This program is carried out through strategic collaboration with DESBUMI (Village Caring for Migrant Workers) as the main partner, and the Halal Center as the technical partner, with the primary goal of assisting MSME entrepreneurs in obtaining business legality, such as the Business Identification Number (NIB), Household Food Industry Production Certificate (SPP-IRT), and halal certification. This activity includes crucial stages, such as identifying data on MSME actors, socializing the importance of business legality, digital marketing training, and intensive assistance in the

business licensing process. The highlight of the activity was marked by the handover of business legality certificates to 25 MSME actors, who now have a legal foundation for the development of their businesses. The program results show an increase in awareness and skills among MSME actors in managing their businesses professionally, expanding market access, and enhancing competitiveness in the digital era. This program not only contributes to economic transformation through business legality but also strengthens the role of women in sustainable inclusive development. With a needs-based approach and support from strategic partners, PROMAHADESA becomes a holistic, inclusive, and sustainable service model, providing real impact for village communities and supporting the achievement of sustainable development goals.

Keywords: Dukuh Dempok, Inclusive, MSMEs

PENDAHULUAN

Desa Dukuh Dempok terletak di Kecamatan Wuluhan berjarak kurang lebih sekitar 40 Km dari kota Jember. Nama Desa Dukuh Dempok berasal dari Dukuh artinya tempat tinggal, sedangkan Dempok diambil dari mbah Dempok (orang yang pertama melakukan pembabatan hutan di wilayah tersebut sebelum menjadi Desa hingga terbentuk menjadi suatu pemukiman). Letak Desa Dukuh Dempok yang wilayahnya cukup padat dengan rumah penduduk, namun mayoritas dari penduduk desa tersebut bermata pencaharian sebagai petani. Tingkat kesuburan tanah yang subur, dimanfaatkan oleh penduduk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam berbagai tanaman. Dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, masyarakat (umat Islam dan Hindu) menggunakan bahasa Jawa, karena masyarakat Desa Dukuh Dempok adalah murni suku Jawa (Rifikian, 2017)

Desa Dukuh Dempok juga memiliki daya tarik wisata, terutama melalui objek wisata Gumuk Watu, yang menawarkan pengalaman edukasi berbasis pertanian dan pelestarian lingkungan. Dalam pengembangan desanya, Dukuh Dempok berupaya memanfaatkan sumber daya alam dan manusia untuk meningkatkan perekonomian lokal serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan (Hutama, 2023). Pembangunan inklusif berkelanjutan, integrasi sosial terhadap kelompok perempuan merupakan salah satu aspek yang sangat penting. Kelompok perempuan sering kali menjadi salah satu kelompok yang rentan dan termarginalkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, politik, maupun budaya. Untuk memahami dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh perempuan agar mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan setara dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi sosial-ekonomi perempuan di banyak negara masih berada pada tingkat yang rendah. Perempuan sering kali memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan layanan kesehatan. Hal ini diperparah oleh adanya norma-norma budaya dan sosial yang diskriminatif, yang memperkuat ketidaksetaraan gender.

Pendidikan merupakan sebuah proses humanisme yang selanjutnya dikenal dengan istilah memanusiakan manusia. Oleh karena itu kita seharusnya bias menghormati hak asasi setiap manusia. Murid dengan kata lain siswa bagaimanapun bukan sebuah manusia mesin yang dapat diatur sekehendaknya, melainkan mereka adalah generasi yang perlu kita bantu dan memberi kepedulian dalam setiap reaksi perubahannya menuju pendewasaan supaya dapat membentuk insan yang swantrata, berpikir kritis serta memiliki sikap akhlak yang baik. Untuk itu pendidikan tidak saja membentuk insan yang berbeda dengan sosok lainnya yang dapat beraktifitas menyantap dan meneguk, berpakaian serta memiliki rumah untuk tinggal hidup, ihwal inilah disebut dengan istilah memanusiakan manusia (Pristiwanti et al, 2022).

Pendidikan adalah kunci utama untuk membuka peluang bagi perempuan. Namun, di banyak negara, perempuan masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pernikahan dini, dan diskriminasi gender sering kali menghalangi perempuan untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, pendidikan adalah fondasi yang penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan keluarganya. Dalam dunia kerja, perempuan juga menghadapi berbagai tantangan. Perempuan sering kali ditempatkan dalam pekerjaan yang berupah rendah dan kurang

mendapatkan perlindungan sosial. Selain itu, diskriminasi gender dan stereotip yang ada di tempat kerja sering kali menghalangi perempuan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan lebih berpengaruh. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih menjadi masalah yang signifikan di banyak negara.

Semua orang menginginkan kehidupan masyarakat yang harmonis, termasuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, baik oleh perseorangan maupun kelembagaan. Bagi sebagian masyarakat yang homogen dan terdiri dari satu suku bangsa, upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis tidak menghadapi banyak kendala. Namun bagi masyarakatnya yang majemuk (Plural Societies), sebagaimana Indonesia,¹ menghadapi kendala cukup serius dalam mewujudkan harmoni masyarakat. Meningkatnya politik identitas suku bangsa seringkali memicu terjadinya konflik antar masyarakat. Sehingga masyarakat yang majemuk memiliki resiko konflik sosial cukup tinggi. Oleh karena itu, pada masyarakat majemuk semacam ini perlu dibangun integrasi sosial untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis. Dalam hal ini integrasi sosial dimaksudkan sebagai proses penyesuaian untuk saling memahami, menerima keadaan, pandangan, dan tindakan dalam satu tatanan kehidupan sosial yang harmonis.² Integrasi sosial tersebut akan terwujud apabila masing-masing individu yang berada di dalam suatu kelompok masyarakat dapat mengendalikan prasangka yang ada ditengah masyarakat sehingga tidak terjadi konflik (Kalsum, 2020).

Integrasi sosial terhadap kelompok perempuan tidak hanya memberikan manfaat bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan anak-anak, dan pertumbuhan ekonomi. Ketika perempuan memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan peluang ekonomi, mereka dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial. Peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi menunjukkan bahwa negara yang memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ekonomi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dan inovasi yang dihasilkan oleh partisipasi perempuan (Renie, 2020).

Selain itu, integrasi sosial terhadap kelompok perempuan juga memiliki dampak positif terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Perempuan yang kemampuan baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan cenderung lebih mampu memberikan perawatan yang baik bagi anak-anak mereka. Hal ini berdampak pada peningkatan kesehatan anak-anak dan penurunan angka kematian bayi dan balita. Selain kesehatan Kabupaten Jember memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang cukup tinggi, yang mendorong banyak penduduk untuk mencari pekerjaan di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Upah yang rendah dan minimnya lapangan pekerjaan di daerah tersebut menjadi alasan utama mereka memilih untuk menjadi PMI. Keberangkatan orang tua untuk bekerja ke luar negeri sering kali meninggalkan anak-anak mereka dalam pengasuhan kakek atau nenek. Hal ini menyebabkan anak-anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua, serta berpotensi mengalami masalah psikologis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa program telah diluncurkan, seperti pemberdayaan perempuan yang bertujuan untuk memberdayakan keluarga pekerja migran dan memastikan hak-hak anak

terpenuhi. Selain itu, program DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) juga berfokus pada pemberdayaan mantan pekerja migran perempuan melalui kelompok usaha. Banyak PMI menghadapi kondisi kerja yang tidak ideal, termasuk eksploitasi dan perlakuan buruk di negara tujuan. Hal ini menambah kompleksitas tantangan yang harus dihadapi oleh para pekerja migran setelah kembali ke tanah air.

Desa Dukuh Dempok, banyak memiliki potensi ekonomi yang besar namun seringkali terhambat oleh kurangnya pengetahuan dan akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk membantu mengatasi tantangan ini, program pengabdian di Desa Dukuh Dempok berfokus pada mendukung ekonomi lokal melalui pengembangan UMKM dan legalitas usaha. Program ini dirancang untuk memberdayakan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, termasuk di pedesaan. Di Desa Dukuh Dempok, banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya pada usaha kecil, seperti pertanian, kerajinan tangan, dan kuliner. Namun, banyak UMKM di desa ini yang belum memiliki akses ke pelatihan, modal, dan informasi yang cukup untuk mengembangkan usahanya. Selain itu, masalah legalitas usaha juga menjadi hambatan utama, di mana banyak usaha yang belum memiliki izin resmi, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Berikut data Penerbitan Izin Legalitas UMKM di Desa Dukuh Dempok

TABEL LEGALITAS USAHA DUSUN WULUHAN

| NO | NAMA | STATUS NIB | STATUS PIRT | STATUS HALAL |
|----|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1 | Tumini | KACANG LICHI | KACANG LICHI | KACANG LICHI |
| 2 | Supartini | - REMPEYEK - KERIPIK PISANG | - REMPEYEK - KERIPIK PISANG | |

Gambar 1. Kegiatan PROMAHADESA 2024, Izin Legalitas UMKM Dusun Wuluhan
(Sumber : Penulis)

TABEL LEGALITAS USAHA DUSUN PURWOJATI

| NO | NAMA | STATUS NIB | STATUS PIRT | STATUS HALAL |
|----|---------------|---|---|---|
| 1 | Suryati | - OPAK GULUNG | - OPAK GULUNG | |
| 2 | Eva | - KUE TART | - KUE TART | |
| 3 | Siti Marfu'ah | | - SIRUP JAHE (PERPANJANGAN) - INSTANT JAHE (BIKIN BARU) | |
| 4 | Ninik | | - SAMBEL PECEL - KOPI BUBUK TULADHA - KOPI BUBUK REMPAH ULUWATU | |
| 5 | Sujarwo | - RUJAK PETIS - RUJAK GOBET - GADO-GADO - CAKWE - ROTI GORENG | | - RUJAK PETIS - RUJAK GOBET - GADO-GADO - ROTI GORENG - CAKWE |
| 6 | Sukesi | ROTI | ROTI | |

Gambar 2. Kegiatan PROMAHADESA 2024, Izin Legalitas UMKM Dusun Purwojadi (Sumber : Penulis)

TABEL LEGALITAS USAHA DUSUN GAWOK

| NO | NAMA | NIB | PIRT | HALAL |
|----|----------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | Mamik Fatmiati | - JAHIT - REMPEYEK | - REMPEYEK | - REMPEYEK |
| 2 | Marwati | - KUNIR ASEM - SARI JAHE - BERAS KENCUR | | - KUNIR ASEM - SARI JAHE - BERAS KENCUR |
| 3 | Dwi Handoko | INDUSTRI BATIK | | |
| 4 | Sugiati | - SELADA HIDROPONIK - KOPI BUBUK - SAMBAL PECEL | - KOPI BUBUK - SAMBAL PECEL | - KOPI BUBUK - SAMBAL PECEL |

Gambar 3. Kegiatan PROMAHADESA 2024, Izin Legalitas UMKM Dusun Gawok (Sumber : Penulis)

TABEL LEGALITAS USAHA DUSUN DUKUH

| NO | NAMA | STATUS NIB | STATUS PIRT | STATUS HALAL |
|----|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 1 | Siti Jazilatul | REMPEYEK | REMPEYEK | REMPEYEK |
| 2 | Mutma'inah | STIK BAWANG | STIK BAWANG | STIK BAWANG |
| 3 | Dewi Srikandi | | BUAT BARU | |
| 4 | Dewi nur | KERIPIK TEMPE | KERIPIK TEMPE | KERIPIK TEMPE |
| 5 | Masudah | ONDE-ONDE | | ONDE-ONDE |
| 6 | Nurul Hidayah | | | |
| 7 | Nabila Amalia | KUE BASAH | | KUE BASAH |
| 8 | Muzayana | | PERPANJANGAN | |
| 9 | Sundari | | PERPANJANGAN | |
| 10 | Yuliatin | BERAS | | |
| 11 | Sukistiani | DAWET TAHU KOCEK | | DAWET TAHU KOCEK |

Gambar 4. Kegiatan PROMAHADESA 2024, Izin Legalitas UMKM Dusun Dukuh
 (Sumber : Penulis)

Digital Marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan. Mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan model pemasaran konvensional/tradisional beralih ke pemasaran moderen yaitu digital marketing. Dengan digital marketing komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu/real time dan bisa mengglobal atau mendunia. Dengan jumlah pengguna social media berbasis chat ini yang banyak dan semakin hari semakin bertambah membuka peluang bagi UKM untuk mengembangkan pasarnya dalam genggam smartphone (Pradiani, 2017). Pemasaran digital menjadi salah satu kunci penting dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini. Pemasaran digital memungkinkan UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional (Herdansyah, 2020). Sayangnya, banyak pelaku UMKM di Desa Dukuh Dempok yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam memasarkan produk mereka.

Keterbatasan pengetahuan tentang teknologi digital dan pemasaran online menjadi hambatan utama. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan metode pemasaran konvensional, seperti penjualan langsung di pasar lokal, yang membatasi jangkauan dan potensi penjualan mereka. Selain itu, minimnya akses terhadap pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi digital juga menjadi kendala yang signifikan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan alat pemasaran digital lainnya, UMKM di Desa Dukuh Dempok kesulitan bersaing di pasar yang lebih luas dan lebih kompetitif. Selain tantangan dalam pemasaran digital, legalitas usaha juga menjadi isu krusial yang

dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Dukuh Dempok. Banyak usaha yang belum memiliki izin resmi, yang tidak hanya membatasi akses mereka ke pasar yang lebih luas tetapi juga menghalangi mereka untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah dan lembaga keuangan.

Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Legalitas usaha merupakan bentuk persetujuan dan pemberian izinterhadap penyelenggaraan kegiatan usaha oleh Pengusaha atau Perusahaan dari Pihak yang berwenang. Oleh karena itu, legalitas usaha menjadi suatu hal yang penting untuk dipenuhi oleh pelaku usaha supaya usahany sah secara hukum. Namun, seringkali Legalitas usaha diabaikan oleh pelaku usaha, termasuk oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Indrawati & Rachmawati, 2021). Proses mendapatkan legalitas usaha, seperti izin usaha mikro kecil (IUMK) dan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Halal, dan PIR-T sering kali dianggap rumit dan memerlukan pemahaman tentang regulasi yang kompleks. Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan tentang prosedur legalitas ini, serta tidak memiliki akses ke pendampingan yang memadai untuk membantu mereka dalam proses pengurusan izin. Akibatnya, banyak UMKM yang tetap beroperasi secara informal, menghadapi risiko hukum, dan kehilangan peluang untuk berkembang lebih lanjut.

Program Pengabdian Masyarakat Desa (PROMAHADESA) merupakan inisiatif strategis yang dirancang untuk memberdayakan kelompok perempuan purna pekerja migran di Desa Dukuh Dempok, Kabupaten Jember, melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, perempuan purna pekerja migran sering menghadapi tantangan ekonomi dan sosial, termasuk keterbatasan akses terhadap sumber daya legalitas usaha serta minimnya kemampuan pemasaran berbasis digital.

PROMAHADESA hadir sebagai solusi melalui kolaborasi dengan DESBUMI sebagai mitra utama dan Halal Center sebagai mitra teknis, menawarkan serangkaian kegiatan mulai dari identifikasi pelaku UMKM, sosialisasi pentingnya legalitas usaha, pelatihan digital marketing, hingga pendampingan pengurusan izin usaha seperti NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal. Dengan menargetkan pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha, program ini bertujuan meningkatkan profesionalitas pengelolaan usaha, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing di era digital. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya transformasi ekonomi lokal yang berbasis inklusif, dengan perempuan sebagai aktor utama, serta kontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE PEMBERDAYAAN

Pelaksanaan program pengabdian di Desa Dukuh Dempok yang berfokus pada dukungan terhadap UMKM dalam pemasaran digital dan legalitas usaha memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur. Metode pelaksanaan ini mencakup berbagai langkah strategis yang dirancang untuk memberikan manfaat maksimal kepada pelaku UMKM di desa ini. Berikut adalah esai mengenai metode pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut:

1. Identifikasi dan Survei Awal

Langkah pertama dalam pelaksanaan program pengabdian ini adalah melakukan identifikasi dan survei awal. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang

relevan mengenai kebutuhan, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh pelaku UMKM di Desa Dukuh Dempok. Survei dilakukan melalui kuesioner dan wawancara langsung dengan pelaku UMKM untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi mereka. Data yang dikumpulkan dari survei ini akan digunakan sebagai dasar untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM di desa tersebut.

2. Pelatihan dan Edukasi

Berdasarkan hasil survei awal, langkah berikutnya adalah mengadakan serangkaian pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM. Pelatihan ini mencakup dua aspek utama: pemasaran digital dan legalitas usaha. Dalam pelatihan pemasaran digital, peserta akan diajarkan tentang penggunaan platform e-commerce, media sosial, pembuatan konten promosi, dan analisis pasar. Narasumber dari kalangan praktisi, akademisi, dan pemerintah akan dilibatkan untuk memberikan materi yang komprehensif dan relevan. Sedangkan dalam pelatihan legalitas usaha, peserta akan mendapatkan pemahaman tentang proses pengurusan izin usaha, penyusunan dokumen, dan regulasi yang berlaku. Edukasi tentang pentingnya legalitas usaha juga akan ditekankan untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM

3. Pendampingan dan Konsultasi

Setelah pelatihan, program dilanjutkan dengan pendampingan dan konsultasi intensif bagi pelaku UMKM. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dalam kegiatan usahanya sehari-hari. Dalam pendampingan pemasaran digital, tim ahli akan membantu UMKM dalam mengatur akun media sosial, membuat strategi pemasaran, dan menganalisis kinerja kampanye pemasaran. Sedangkan dalam pendampingan legalitas usaha, tim pendampingan akan mendampingi proses pengajuan izin usaha, termasuk penyusunan dokumen dan pengajuan permohonan ke instansi terkait. Konsultasi yang diberikan akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha, baik yang berkaitan dengan produksi, manajemen, maupun pemasaran.

4. Pembangunan Jaringan Kerja Sama

Metode pelaksanaan berikutnya adalah pembangunan jaringan kerja sama antara pelaku UMKM dengan berbagai pihak terkait, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan komunitas lokal. Jaringan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelaku UMKM ke sumber daya, modal, dan pasar yang lebih luas. Kegiatan yang dilakukan meliputi pertemuan rutin, forum diskusi, dan kegiatan kolaboratif lainnya. Melalui kerja sama ini, pelaku UMKM dapat berbagi pengetahuan, pengalaman, dan best practices, serta menjalin kemitraan yang saling menguntungkan. Kemitraan dengan penyedia layanan digital dan platform e-commerce juga akan dijalin untuk memberikan akses yang lebih mudah dan terjangkau bagi pelaku UMKM. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas program pengabdian. Tujuannya adalah mengukur kemajuan dan dampak program terhadap pelaku UMKM di Desa Dukuh Dempok, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan penyesuaian. Metode evaluasi yang digunakan antara lain survei kepuasan peserta,

analisis data kinerja, dan feedback dari pelaku UMKM. Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan program pengabdian di masa mendatang.

HASIL PEMBERDAYAAN DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian yang bertujuan untuk membantu kelompok perempuan pelaku usaha UMKM purna pekerja migran di Desa Dukuhdempok dilaksanakan dengan kerjasama mitra kami, Desbumi (Desa Peduli Buruh Migran). Kegiatan ini dimulai pada tanggal 15 Februari 2024 dan berlanjut hingga 11 Juni 2024. Fokus dari olah data ini adalah mengidentifikasi dan mengelompokkan perempuan purna pekerja migran yang memiliki usaha namun belum memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikasi halal. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai proses dan hasil dari olah data tersebut.

Olah Data Kelompok Perempuan Pelaku usaha UMKM Purna Pekerja Migran

Langkah pertama yang kami lakukan adalah mengumpulkan semua data purna pekerja migran dari pengurus Desbumi. Data yang diberikan meliputi informasi pribadi, jenis usaha yang dijalankan, dan status legalitas usaha masing-masing individu. Data ini sangat penting untuk memahami profil umum dari pelaku usaha dan kebutuhan spesifik mereka terkait legalitas usaha. Setelah menerima data dari pengurus Desbumi, kami melakukan verifikasi dan crosscheck untuk memastikan bahwa data yang kami miliki akurat dan sesuai dengan target kami. Proses ini melibatkan pengecekan ulang terhadap informasi yang telah diberikan dan konfirmasi langsung dengan individu terkait. Kami fokus pada purna pekerja migran yang memiliki usaha namun belum memiliki legalitas izin usaha. Dari hasil verifikasi ini, kami menemukan bahwa terdapat sekitar 25 purna pekerja migran yang memiliki usaha namun belum memiliki legalitas izin usaha.

Setelah verifikasi data, langkah berikutnya adalah mengkategorikan dan mengelompokkan data berdasarkan jenis usaha dan status legalitasnya. Pengelompokan ini bertujuan untuk memudahkan analisis dan penyusunan rencana intervensi yang lebih spesifik. Kami mengelompokkan data berdasarkan beberapa kategori utama seperti jenis usaha (kuliner, kerajinan tangan, jasa, dll.), status kepemilikan izin (belum memiliki NIB, PIRT, atau sertifikasi halal), dan kebutuhan pelatihan atau pendampingan. Dengan data yang telah terverifikasi dan terkelompokkan, kami kemudian melakukan analisis untuk memahami lebih dalam mengenai profil usaha, tantangan yang dihadapi, dan kebutuhan spesifik setiap pelaku usaha.

Mengidentifikasi jenis usaha yang paling umum dan paling membutuhkan dukungan. Menganalisis seberapa banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha tertentu dan hambatan apa saja yang mereka hadapi dalam mengurus izin tersebut. Mengidentifikasi jenis pelatihan dan pendampingan yang paling diperlukan, seperti pelatihan manajemen usaha, bantuan proses legalitas, dan akses ke pasar. Dari hasil olah data, kami menemukan bahwa sebagian besar purna pekerja migran di Desa Dukuh Dempok menjalankan usaha di bidang kuliner, kerajinan tangan, dan jasa. Mereka memulai usaha tersebut dengan modal yang terbatas dan sebagian besar masih bersifat skala kecil atau mikro. Beberapa dari mereka sudah berhasil mengembangkan usaha hingga memiliki pelanggan tetap, namun banyak yang masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait legalitas dan akses pasar.



Gambar 5. Kegiatan PROMAHADESA 2024, olah data kelompok perempuan wirausaha UMKM (Sumber : Penulis)

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari 25 purna pekerja migran yang memiliki usaha, sebagian besar belum memiliki NIB, PIRT, atau sertifikasi halal. Alasan utama yang diidentifikasi meliputi kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengurusan izin, biaya yang dianggap mahal, dan proses yang dianggap rumit. Beberapa pelaku usaha juga merasa takut atau ragu untuk mengurus izin karena khawatir tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil analisis, kami menemukan bahwa kebutuhan utama para pelaku usaha adalah pelatihan dan pendampingan dalam beberapa aspek, antara lain banyak pelaku usaha yang membutuhkan pelatihan tentang pengelolaan usaha, pembukuan, dan perencanaan bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas usaha mereka. Bantuan dalam memahami dan mengurus proses legalitas usaha, termasuk penyusunan dokumen dan pengajuan permohonan izin. Dukungan untuk memperluas akses pasar melalui pemasaran digital, kemitraan dengan platform e-commerce, dan strategi pemasaran yang efektif.

Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang telah dilakukan, kami merumuskan beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk mendukung pelaku usaha UMKM purna pekerja migran di Desa Dukuh Dempok:

1. Pelatihan Terpadu

Mengadakan program pelatihan terpadu yang mencakup manajemen usaha, pemasaran digital, dan proses legalitas. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

2. Pendampingan Legalitas Usaha

Menyediakan layanan pendampingan intensif untuk membantu pelaku usaha dalam mengurus legalitas izin usaha. Pendampingan ini meliputi konsultasi, penyusunan dokumen, dan pendampingan dalam setiap tahap pengurusan izin. Hal ini diharapkan dapat mengurangi hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam mengurus legalitas usaha.

3. Pengembangan Jaringan Pemasaran

Membangun jaringan pemasaran yang kuat melalui kemitraan dengan platform e-commerce, media sosial, dan komunitas bisnis lokal. Strategi ini bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk UMKM dan meningkatkan penjualan. Selain itu, pelatihan tentang strategi pemasaran digital dan manajemen toko online juga perlu diberikan.

Sosialisasi Pentingnya Legalitas Izin Usaha sampai Pelatihan Digital Marketing dan Pemasaran Produk.

Pada tanggal 9 Juli 2024 dan 25 Juli 2024, pelaksanaan sosialisasi darii serangkaian kegiatan penting bagi para purna pekerja migran yang telah beralih menjadi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini terdiri dari sosialisasi mengenai pentingnya legalitas izin usaha dan pelatihan digital marketing serta pemasaran produk. Program ini dirancang untuk memberdayakan para pelaku UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan dan kompetitif di era digital. Banyak purna pekerja migran yang kembali ke desa dengan impian untuk memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri. Namun, banyak dari mereka yang tidak menyadari betapa pentingnya memiliki izin usaha yang sah. Legalitas usaha bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga merupakan landasan yang penting untuk keberlangsungan dan perkembangan usaha. Sosialisasi dimulai dengan pemaparan oleh narasumber dari Dinas Koperasi dan UMKM serta BPOM yang menjelaskan berbagai jenis izin usaha yang diperlukan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi halal.



Gambar 6. Kegiatan PROMAHADESA 2024, Sosialisasi pentingnya legalitas usaha dan pelatihan digital marketing
(Sumber : Penulis)

Materi sosialisasi mencakup penjelasan mengenai berbagai keuntungan yang didapatkan dari memiliki izin usaha yang sah, termasuk akses ke pasar yang lebih luas,

kepercayaan konsumen yang meningkat, dan peluang untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah serta lembaga keuangan. Langkah-langkah detail yang harus ditempuh oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin, mulai dari persiapan dokumen hingga pengajuan permohonan ke instansi terkait. Konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi, termasuk risiko denda dan penutupan usaha. Sosialisasi ini berhasil meningkatkan kesadaran para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha. Banyak peserta yang menyatakan kesediaan mereka untuk segera mengurus izin usaha setelah memahami manfaat dan prosedur yang diperlukan. Selain itu, beberapa peserta juga langsung mendaftar untuk mendapatkan bantuan pendampingan dalam proses pengurusan izin.

Dalam era digital yang semakin berkembang, pemasaran melalui platform digital menjadi sangat penting. Banyak pelaku UMKM yang masih belum familiar dengan strategi digital marketing, padahal potensi untuk memperluas pasar melalui internet sangat besar (Naimah et al, 2020). Untuk itu, pada tanggal 25 Juli 2024, diadakan pelatihan digital marketing dan pemasaran produk yang bertujuan untuk membekali para pelaku UMKM dengan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar digital. Penjelasan tentang konsep dasar digital marketing, keuntungan dari strategi pemasaran digital, dan platform yang paling efektif untuk UMKM. Panduan langkah demi langkah untuk membuat dan mengelola akun media sosial, serta membuat website toko online yang profesional dan menarik. Teknik-teknik pembuatan konten yang menarik dan relevan untuk audiens target, termasuk tips untuk fotografi produk, penulisan deskripsi, dan pembuatan video promosi.

Pelatihan digital marketing ini mendapatkan respon dari masyarakat Desa Dukuh Dempok yang sangat positif. Masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga langsung mempraktikkan teknik-teknik yang diajarkan selama pelatihan. Banyak peserta yang merasa lebih percaya diri untuk memasarkan produk mereka secara online setelah mengikuti pelatihan ini. Selain itu, beberapa peserta juga berhasil meningkatkan penjualan produk mereka melalui strategi pemasaran digital yang efektif. Pada tanggal 15 Agustus 2024, sebuah acara penting dilaksanakan di Desa Dukuh Dempok yang menjadi tonggak sejarah bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Acara ini adalah penyerahan legalitas usaha kepada masyarakat UMKM desa, yang merupakan puncak dari serangkaian upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi usaha di kalangan purna pekerja migran yang kini menjadi pelaku UMKM. Kegiatan ini tidak hanya simbolis, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha para pelaku UMKM di desa tersebut.

Manifes Pengabdian Melalui Wujud Penyerahan Legalitas Izin Usaha

Desa Dukuh Dempok, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, memiliki potensi ekonomi yang besar yang digerakkan oleh para pelaku UMKM. Namun, banyak dari usaha ini yang belum memiliki legalitas resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT), dan sertifikasi halal. Kurangnya pengetahuan tentang proses pengurusan izin, biaya yang dianggap mahal, dan prosedur yang rumit sering kali menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha. Untuk mengatasi tantangan ini, sebuah program pengabdian diluncurkan

dengan fokus pada sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan dalam proses pengurusan izin usaha.

Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya legalitas usaha, serta membantu pelaku UMKM dalam setiap langkah proses pengurusan izin. Penyerahan legalitas usaha pada tanggal 15 Agustus 2024 menjadi puncak dari program ini, menunjukkan hasil nyata dari upaya yang telah dilakukan. Proses persiapan acara penyerahan legalitas usaha dimulai beberapa bulan sebelumnya dengan berbagai kegiatan pendahuluan. Tahap pertama adalah sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha, yang diadakan pada tanggal 9 Juli 2024 dan 25 Juli 2024. Sosialisasi ini melibatkan narasumber dari Sertifikasi Halal dan UMKM serta BPOM yang menjelaskan berbagai jenis izin usaha yang diperlukan dan manfaatnya bagi keberlangsungan usaha.



Gambar 7. Kegiatan PROMAHADESA 2024, Manifes Pengabdian Berupa Penyerahan Sertifikat Legalitas Usaha (Sumber : Penulis)

Setelah sosialisasi, pelatihan dan pendampingan intensif dilakukan untuk membantu pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha mereka. Pendampingan ini mencakup bantuan dalam penyusunan dokumen, pengajuan permohonan ke instansi terkait, dan konsultasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan dukungan dari para ahli dan praktisi, pelaku UMKM di Desa Dukuh Dempok dapat memahami dan menjalani proses pengurusan izin dengan lebih mudah. Pada tanggal 15 Agustus 2024, acara penyerahan legalitas usaha berlangsung dengan khidmat di balai desa. Acara ini dihadiri oleh para pelaku UMKM, perwakilan pemerintah daerah, serta berbagai pihak yang terlibat dalam program pengabdian ini. Suasana acara penuh dengan kegembiraan

dan harapan, mengingat pentingnya momen ini bagi perkembangan usaha di desa tersebut.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Dukuh Dempok yang menekankan pentingnya legalitas usaha bagi keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Beliau juga mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah terlibat dalam program ini, mulai dari sosialisasi hingga pendampingan. Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM yang memberikan apresiasi terhadap semangat dan dedikasi pelaku UMKM dalam mengurus legalitas usaha mereka. Puncak acara adalah penyerahan sertifikat legalitas usaha kepada para pelaku UMKM. Sebanyak 25 pelaku usaha menerima sertifikat NIB, SPP-IRT, dan sertifikasi halal, yang diserahkan langsung oleh perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM serta BPOM. Setiap pelaku usaha yang menerima sertifikat tampak sangat bangga dan bersemangat, mengingat usaha mereka kini telah memiliki landasan hukum yang kuat untuk berkembang lebih lanjut.

Adapun kegiatan pengabdian yang tim kami lakukan ini diharapkan dapat memberikan dampak dan juga manfaat terhadap masyarakat desa Dukuh Dempok berupa Penyerahan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Dukuh Dempok. Beberapa manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Akses Pasar yang Lebih Luas legalitas usaha yang sah, pelaku UMKM dapat memperluas akses pasar mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Sertifikat legalitas seperti NIB dan SPP-IRT memungkinkan produk mereka untuk dijual di pasar yang lebih besar dan berbagai platform e-commerce.
2. Kepercayaan Konsumen: Legalitas usaha memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli telah memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Hal ini meningkatkan kepercayaan konsumen dan reputasi usaha di pasar.
3. Akses ke Dukungan Pemerintah: Pelaku UMKM yang memiliki izin usaha resmi lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah, termasuk program bantuan modal, pelatihan lanjutan, dan berbagai insentif lainnya. Legalitas usaha juga membuka peluang untuk mengikuti tender dan proyek pemerintah.
4. Keberlanjutan Usaha: Dengan dasar hukum yang kuat, pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka dengan lebih percaya diri dan berkelanjutan. Legalitas usaha juga melindungi mereka dari risiko hukum dan penutupan usaha yang tidak diinginkan.

Terjalin nya Kemitraan Dengan Stakeholder Terkait Kerja sama dengan DESBUMI (Desa Peduli Buruh Migran) sebagai mitra utama dalam program pengabdian ini merupakan langkah strategis untuk memastikan tercapainya tujuan pemberdayaan perempuan dalam konteks pembangunan inklusif berkelanjutan. DESBUMI, yang beranggotakan perempuan dengan persentase 100%, memiliki pengalaman, kapasitas, dan jejaring sosial yang sangat relevan untuk mendukung implementasi program ini. Sebagai organisasi berbasis komunitas, DESBUMI telah berperan aktif dalam mendampingi buruh migran, khususnya perempuan, dalam aspek perlindungan hak, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan ekonomi. Keterlibatan mereka memungkinkan adanya pendekatan berbasis kebutuhan lokal (local needs-based approach), sehingga program yang dirancang dapat lebih kontekstual dan efektif menjawab tantangan yang dihadapi perempuan di wilayah tersebut.

Kolaborasi dengan DESBUMI juga memperkuat dimensi inklusivitas program pengabdian ini karena menciptakan ruang partisipasi aktif bagi perempuan dalam setiap tahap kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, partisipasi perempuan memiliki dampak multiplikasi yang signifikan, seperti meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat kohesi sosial, dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Dengan keterlibatan DESBUMI, program ini tidak hanya sekadar memberikan solusi teknis, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui pemberdayaan perempuan yang berbasis komunitas. Kerja sama ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen untuk mewujudkan pembangunan inklusif, di mana perempuan menjadi aktor utama dan perubahan yang berkelanjutan dapat terwujud.

Kolaborasi dengan Halal Center sebagai mitra strategis dalam program pengabdian ini memainkan peran penting dalam mewujudkan legalitas usaha bagi keberlanjutan dan pengembangan UMKM. Halal Center memiliki keahlian dalam mendampingi pelaku usaha, khususnya UMKM, untuk memenuhi standar halal dan memperoleh sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Legalitas usaha, termasuk sertifikasi halal, bukan hanya memberikan kepercayaan konsumen terhadap produk, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun di pasar global. Dengan dukungan Halal Center, UMKM yang menjadi sasaran program akan mendapatkan akses pengetahuan dan pendampingan teknis, mulai dari pemenuhan dokumen legal hingga proses sertifikasi, yang menjadi fondasi penting untuk memperkuat daya saing mereka.

Kerja sama ini juga sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sertifikasi halal tidak hanya memastikan keberlanjutan usaha melalui kepercayaan konsumen, tetapi juga mendukung praktik usaha yang etis, higienis, dan ramah lingkungan. Dengan dukungan Halal Center, program ini dapat mendorong transformasi UMKM dari usaha informal menjadi entitas yang legal dan profesional. Kolaborasi ini juga memperkuat ekosistem UMKM yang inklusif dan berdaya saing, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan inklusif berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional.

SIMPULAN

Program pengabdian ini telah berhasil memberdayakan kelompok perempuan purna pekerja migran di Desa Dukuh Dempok melalui serangkaian kegiatan yang terintegrasi, mulai dari olah data, sosialisasi, pelatihan, hingga pendampingan legalitas usaha. Dengan dukungan mitra strategis seperti DESBUMI dan Halal Center, program ini mampu menjawab tantangan utama yang dihadapi pelaku usaha UMKM, khususnya terkait legalitas usaha dan pengembangan kapasitas. Hasil nyata dari program ini adalah penyerahan sertifikat legalitas usaha, yang tidak hanya memberikan landasan hukum bagi keberlanjutan usaha tetapi juga memperkuat daya saing pelaku UMKM di pasar yang lebih luas.

Selain itu, program ini juga mendorong transformasi sosial dengan meningkatkan peran aktif perempuan dalam pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Untuk memastikan dampak yang berkelanjutan, disarankan agar program ini dilanjutkan dengan fokus pada beberapa aspek strategis. Pertama, mengadakan pelatihan lanjutan

dalam pemasaran digital dan pengelolaan usaha agar pelaku UMKM dapat terus beradaptasi dengan dinamika pasar. Kedua, memperluas jaringan kemitraan dengan lembaga keuangan dan platform e-commerce untuk memberikan akses yang lebih baik kepada pelaku UMKM dalam hal permodalan dan pemasaran. Ketiga, mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan legalitas usaha yang telah dicapai dapat dipertahankan dan dioptimalkan dalam jangka panjang. Terakhir, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan mitra strategis lainnya untuk memperluas jangkauan program ke desa-desa lain yang memiliki tantangan serupa. Dengan langkah-langkah ini, program pengabdian ini dapat terus memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 7911-7915.
- Ramadina, R., Maharani, P., Asyifa'aini, N., Sarah, S., Damayanti, E., Safitri, A. E., ... & Altiarika, E. (2023). PEMBERDAYAAN BRANDING KWT DAN POTENSI WISATA DANAU KAOLIN MELALUI INTEGRASI DIGITAL MENUJU BISNIS LOKAL BERKELANJUTAN. *semnas-pkm*, 1(1), 37-47.
- Rifkian, B. E., Suharso, P., & Sukidin, S. (2017). Modernisasi Pertanian (Studi Kasus Tentang Peluang Kerja Dan Pendapatan Petani Dalam Sistem Pertanian Di Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember). *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial*, 11(1), 39-48.
- Pradiani, T. (2017). Pengaruh sistem pemasaran digital marketing terhadap peningkatan volume penjualan hasil industri rumahan. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 11(2), 46-53.
- Kalsum, A. U., & Fauzan, F. (2020). Integrasi sosial dalam membangun keharmonisan masyarakat. *JAWI*, 2(1).
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241
- Hutama, P. S., Oktawirani, P., Prananta, R., Lokaprasida, P., & Nugroho, M. A. (2023). Identifikasi Potensi Wisata Di Kecamatan Wuluhan Sebagai Kawasan Super Prioritas Kabupaten Jember. *Konferensi Nasional Mitra FISIP*, 1(1), 186-193..
- Naimah, R. J., Wardhana, M. W., Haryanto, R., & Pebrianto, A. (2020). Penerapan digital marketing sebagai strategi pemasaran UMKM. *Jurnal IMPACT: Implementation and Action*, 2(2), 119-130.
- Renie, E. (2020). Partisipasi Perempuan Dalam Ekonomi Inklusif. *AGENDA: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, 2(1), 10-17.
- Hendarsyah, D. (2020). Pemasaran digital dalam kewirausahaan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 25-43.